

**Keterjaminan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan
di Indonesia sebagai hasil dari tujuan pembangunan berkelanjutan
(17 SDGs)**



Kelompok 3 (kelompok 33 PKKMB Fakultas):

- 1. Zayda Sulistia Ningrum (2110115006)**
- 2. Reza Umamah (2110115061)**
- 3. Kevin Putra Pratama (2110115069)**
- 4. Siti Khotijah (2110115084)**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

ABSTRAK

Peningkatan kebutuhan bertambah seiring berjalannya waktu sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk akan tetapi kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak bisa terpenuhi karena sumber daya yang ada tidak cukup untuk seluruh umat manusia. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan seluruh negara untuk melakukan kebijakan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya paling tidak untuk makan tiga kali sehari. Pemerintah pun diharuskan membuat kebijakan-kebijakan yang adil serta merata ke semua masyarakat. Nantinya masyarakat yang tidak berdaya ini akan di bimbing dan diberikan penyuluhan agar masyarakat secara mandiri dapat berdaya dengan kemampuan mereka untuk memanfaatkan potensi yang ada.

PENDAHULUAN

Sebuah negara pasti mengalami pertambahan jumlah penduduk seiring bertambahnya tahun, pertambahan penduduk di satu sisi memiliki dampak positif tetapi di satu sisi lainnya juga mempunyai sisi negatif. Pertambahan penduduk adalah hal yang biasa bagi sebuah negara, namun, pertambahan penduduk dapat menyebabkan jumlah penduduk tidak sebanding dengan wilayah negara. selain itu, kebutuhan akan bahan pokok, pakaian dan tempat tinggal pun semakin meningkat. Kelangkaan SDA sangat terbatas sedangkan kebutuhan selalu bertambah, lalu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat?

Pada esai ini kita akan menelaah tentang ketersediaan pangan atau biasa disebut ketahanan pangan. Sebelum menelaah lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu ‘ketahanan pangan’? Ketahanan pangan ialah kondisi dimana pangan yang ada dapat memenuhi kebutuhan negara sampai masyarakat kecil. Baik dari segi kuantitas maupun mutu dari pangan tersebut, juga harus menyeluruh dan tercapai bagi seluruh masyarakat. Untuk mengukur bagaimana tingkat ketercukupan bahan makanan suatu daerah, maka dibuatlah suatu skema penilaian yang disebut “indeks ketahanan pangan”. Ada Sembilan indeks yang dipakai untuk mengukur hal tersebut, yaitu: Masyarakat tanpa air bersih, rata-rata rentang lama sekolah bagi anak perempuan, jumlah anak yang menderita stunting, lamanya angka peluang hidup, tingkat kepadatan wilayah, masyarakat tanpa jangkauan listrik, pengeluaran untuk pangan.

ISI

Seluruh negara sedang dihadapi dengan adanya kelangkaan. Kelangkaan ini membuat seluruh negara harus menggunakan sumber daya secara efisien. Di Indonesia sumber daya sangat berlimpah, namun kekayaan alam yang berlimpah ini tidak menjamin semua masyarakat mendapatkan hak dan kebutuhannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa wilayah di Indonesia masih kesulitan perihal ekonomi. Di negara maju pun yang notabene pendapatan perkapitanya lebih besar masih terdapat tunawisma dan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai permasalahan yang dialami seluruh dunia, maka dengan ini PBB menyatakan sebuah komitmen diantara negara-negara di seluruh penjuru dunia untuk melakukan upaya dalam menyejahterakan masyarakat yaitu melalui 17 SDGs ini.

Salah satu tujuan dari 17 SDGs adalah ketahanan pangan atau tidak adanya kelaparan juga pengurangan kemiskinan, ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Masyarakat berdaya berarti masyarakat yang memiliki kemampuan atau kemandirian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan itu meliputi berpikir secara mandiri, berpikir rasional dalam bertindak dan dapat mengendalikan perilaku mereka.

Ketidakterdayaan ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk bisa merasakan hal yang sama dengan mereka yang memiliki kemampuan. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan masyarakat yang lemah dan tak berdaya, atau tidak memiliki akses sumber daya dapat merasakan dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Masalah ini haruslah menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun perencanaan program kerja kedepannya. Nantinya kebijakan yang dibuat harus dapat memberikan kesejahteraan dan juga memperhatikan kondisi sosial budaya maupun ekonomi negara.

Salah satu ketidakberdayaan masyarakat adalah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan. Tidak semua masyarakat di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya tiga kali sehari karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

Pertumbuhan pangan akan tumbuh sejalan dengan penambahan penduduk. Apabila penduduk bertambah maka kebutuhan pangan akan meningkat. Akan tetapi sumber daya yang ada tidak dapat memenuhi semua keinginan penduduk, hanya penduduk yang memiliki kemampuan saja yang dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan secara nasional dalam ketahanan pangan.

Menurut jurnal pola pengeluaran pangan rumah tangga di provinsi jateng menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan proporsi rumah tangga rentan pangan terbesar senilai 41,04% diikuti rawan pangan sebesar 38,94%, kurang pangan 10,45% dan tahan pangan 9,56%. Berdasarkan data tersebut bahwa hanya sedikit saja masyarakat yang memiliki ketahanan pangan sedangkan selebihnya belum memiliki ketahanan pangan.

Berdasarkan temuan sebagian besar rumah tangga terletak di area pedalaman adalah rentan pangan, keadaan ini dikarenakan oleh tingkat pendapatan yang diterima masyarakat rendah walaupun pedesaan adalah penghasil komoditas. Rendahnya pendapatan disebabkan sempitnya kesempatan kerja dan variasi pekerjaan yang sedikit. Rata-rata mereka yang tinggal di pedalaman memiliki keterbatasan akses dan minimum pendapatan dibandingkan penduduk di perkotaan. Dengan hasil dari hasil pengamatan ini sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan masalah ketahanan pangan ini di pedesaan. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang dan memudahkan akses penduduk kepada SDM dengan harapan dapat menimbulkan peningkatan pemasukan rumah tangga melalui kegiatan yang bermanfaat.

Lalu Hal-hal yang harus diprioritaskan dalam ketahanan pangan secara nasional. Yaitu : masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, negara wajib menjamin penduduknya mendapatkan hak atas pangan untuk keberlangsungan hidup penduduk. Ketiga, negara juga wajib menjamin ketercukupan/ketercukupan jumlah makanan dan mutunya agar tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan. Keempat, upaya lain yang harus dilakukan adalah keamanan pangan untuk mencegah dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan seperti tercemar kimia. Kelima, Keterjangkauan pangan menunjukkan mudahnya akses dan kesamaan keleluasan setiap orang dalam memenuhi hak atas ketersediaan pangan mereka.

Dalam peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 dijelaskan upaya pemerintah dalam mengatur program dan kearifan ketahanan pangan, yaitu: pertama, Pengembangan sistem produksi, efisiensi dalam sistem usaha pangan juga teknologi produksi pangan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan. Kedua, melakukan cadangan pangan skala nasional yang berpangkal dari masyarakat dan pemerintah, cadangan pemerintah berasal dari berbagai tingkat pemerintah seperti tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, sedangkan cadangan masyarakat berasal dari LSM, organisasi masyarakat. Ketiga, mengantisipasi terjadinya masalah pangan seperti kekurangan atau kelebihan pangan melalui penanggulangan dan pencegahan.

Keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, produksi, cadangan pangan, teknologi pangan, juga cara mencegah masalah pangan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi Indonesia. Kelima, penganeekaragaman pangan dimaksudkan agar pangan yang dapat dikonsumsi bervariasi dan tidak hanya bergantung pada suatu produk seperti beras. Misalkan saat beras sedang naik masyarakat bisa mengonsumsi kentang atau singkong sebagai pengganti beras untuk sementara.

Ketersediaan pangan masyarakat tidak menanggung bahwa semua masyarakat memperoleh semua pangan yang dibutuhkan. Sehingga prioritas yang dibutuhkan yaitu menyangkut rumah tangga itu sendiri. Dengan memprioritaskan ketahanan pada rumah tangga, dimaksudkan agar masyarakat secara mandiri berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah.

Ketahanan pangan masyarakat menjadi tugas dan kewajiban masing-masing daerah juga pusat, satu daerah dengan daerah lain memiliki sumber daya yang berbeda-beda sehingga kebijakannya pun sedikit berbeda. Perbedaan potensi usaha masing-masing daerah pun berbeda maka untuk itu ekspansi kesempatan kerja dilakukan sesuai dengan sumber daya alam masing-masing wilayah seperti dataran rendah biasanya penduduknya berusaha tani sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai berusaha sebagai nelayan.

Kemudian bagaimana cara untuk menakar tingkat posisi ketahanan pangan di Indonesia? mengukur bagaimana tingkat ketercukupan bahan makanan suatu daerah,

maka dibuatlah suatu skema penilaian yang disebut “indeks ketahanan pangan”. Ada Sembilan indeks yang dipakai untuk mengukur hal tersebut, yaitu: Masyarakat tanpa air bersih, rata-rata rentang lama sekolah bagi anak perempuan, jumlah anak yang menderita stunting, lamanya angka peluang hidup, total tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan wilayah, masyarakat tanpa jangkauan listrik, pengeluaran untuk pangan, Penduduk di bawah batas kemiskinan, Rasio konsumsi normal per kapita dihadapkan pada jumlah bahan makanan berkarbohidrat

Berikut dibawah ini dijelaskan Sembilan indikator IKP :

Penduduk di posisi bawah standar garis kemiskinan

Indikator ini menilai berapa pengeluaran yang dipakai oleh rakyat untuk mengisi keperluan pokoknya seperti keperluan makanan maupun non makanan, demi hidup yang memadai. masyarakat yang merasakan di bawah batas kemiskinan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.

- pengeluaran untuk makan

berdasarkan teori engel semakin tinggi tingkat pemasukan seseorang maka makin kecil pengeluaran yang dialokasikan untuk konsumsi makanan. Hal ini dinilai baik untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan ketahanan bahan pokok. Makin besar kesejahteraan rakyat maka pengeluaran penduduk makin sedikit.

- rata-rata rentang lama sekolah bagi anak perempuan

rata-rata rentang lama sekolah bagi anak perempuan adalah total tahun yang digunakan oleh anak perempuan dengan usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. situasi ini sangat mempengaruhi status kesehatan dan gizi, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan selaras dengan penyerapan pangan.

- Masyarakat tanpa air bersih

Masyarakat tanpa air bersih adalah masyarakat yang tidak mempunyai akses ke tempat air minum berasal seperti, pompa air atau sumur. Air bersih ini menjadi sangat penting untuk daya tahan pangan karena jika kekurangan air bersih akan terjadi malnutrisi di daerah itu. Sanitasi menjadi penting karena untuk mengurangi penyakit seperti diare.

- total tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan wilayah
rasio total tenaga kesehatan per penduduk dihadapkan kepada kepadatan penduduk akan memberi dampak kerentanan pangan di suatu daerah.

- jumlah anak yang menderita stunting
balita stunting yakni balita dibawah usia lima tahun yang mempunyai tinggi badan kurang dari -2 SD (standar deviasi). Indikator ini sangat bagus jika digunakan, pada status gizi pada anak untuk melihat kelompok penyerapan tingkat pangan.

- lamanya angka peluang hidup
angka peluang hidup yakni salah satu penilaian pangan karena jumlah bayi lahir dan hidup dengan usia yang lama akan mempengaruhi jumlah pangan yang akan dikonsumsi dengan asumsi tidak ada mortalitas. Angka peluang hidup juga menunjukkan tingkat kesehatan penduduk.

- masyarakat tanpa jangkauan listrik
teraksesnya listrik di suatu area akan membuka kesempatan untuk akses pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesejahteraan suatu area, yang akhirnya memberi dampak pada kondisi ketahanan pangan. Total rumah tanpa adanya jangkauan listrik diduga akan meningkatkan kerentanan pangan.

- Rasio konsumsi normal per kapita terhadap jumlah bahan makanan berkarbohidrat
Rasio konsumsi normal per kapita terhadap jumlah bahan pengganti nasi contohnya, jagung, umbi-umbian, padi dan makanan berkarbohidrat lainnya. Kemudian, konsumsi normative diukur sebesar 300 gram/hari.

Dengan menggunakan Sembilan indikator IKP diatas dapat mengetahui berapa besaran tingkat ekonomi di suatu wilayah, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah nanti akan lebih menasar ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan dan SDA lebih bisa dimanfaatkan secara optimal.

Namun, apapun itu sumber daya alamnya tujuannya adalah untuk pembangunan ketahanan pangan skala nasional yang dimulai dari rumah tangga dengan meningkatkan daya beli rumah tangga melalui peningkatan pendapatan, setidaknya sudah mengurangi kerentanan ketahanan pangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berdaya dalam mengisi keperluan pokoknya, juga dengan fasilitas yang diberikan oleh pusat dalam menunjang ketahanan pangan.

KESIMPULAN

Lalu Hal-hal yang harus diprioritaskan dalam ketahanan pangan secara nasional. Yaitu : masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, negara wajib menjamin penduduknya mendapatkan hak atas pangan untuk keberlangsungan hidup penduduk. Ketiga, negara juga wajib menjamin ketercukupan/ketercukupan jumlah makanan dan mutunya agar tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan. Keempat, upaya lain yang harus dilakukan adalah keamanan pangan untuk mencegah dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan seperti tercemar kimia. Kelima, Keterjangkauan pangan menunjukkan mudahnya akses dan kesamaan keleluasan setiap orang dalam memenuhi hak atas ketersediaan pangan mereka.

Namun, apapun itu sumber daya alamnya tujuannya adalah untuk pembangunan ketahanan pangan skala nasional yang dimulai dari rumah tangga dengan meningkatkan daya beli rumah tangga melalui peningkatan pendapatan, setidaknya sudah mengurangi kerentanan ketahanan pangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berdaya dalam mengisi keperluan pokoknya, juga dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam menunjang ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2018. "Indeks Ketahanan Pangan Indonesia". Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018 (pertanian.go.id)
- Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 9, No. 1, hal. 1 – 27
- Purwaningsih, Yunastiti. Hartanto, Slamet. Masyhuri. Mulyo, Jangkung Handoyo. 2010. Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah*. Volume 11, No. 2, hlm.236-253
- Widjajanti, Kesi. 2011. Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27
- Syahza, Almasdi. Suarman. 2013. Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 126-139